

GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA DAN PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS OIKUMENE DI INDONESIA TIMUR

Sientje Latuputty

Dosen Program Studi Teologi

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua

Email : sientje2003@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Spiritualisme Oikumene bagi Mahasiswa Theologia di Indonesia Timur.

Bertolak dari identitas GKI, dan hubungan oikumenisnya dengan gereja-gereja di dalam dan di luar negeri, diharapkan ada dampak dan makna khusus bagi gerakan oikumene di Indonesia dan secara khusus di Indonesia Timur.

Jika ada anggapan bahwa Papua sebagai daerah tertinggal di ujung Timut Indonesia, maka dibidang oikumene, saat ini GKI telah menjadi bintang kejora di ufuk timur yang memberi contoh konkrit kehidupan oikumene. Contoh bagi kehidupan oikumene di Indonesia yang tampak jelas dalam eklesiologinya dan dalam kehidupan berjemaat di Papua.

Dengan demikian menghadapi konteks yang selalu berubah maka gereja-gereja di Indonesia perlu kritis dan realistik untuk menjawab kebutuhan konteks yang di dalamnya gereja berada.

Kata kunci: Oikumene, Eklesiologi, Spiritualisme, Kritis dan Realistis.

1. PENDAHULUAN

Konsultasi Mahasiswa Teologi Indonesia Timur merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa teologi yang berdiam, belajar dan nanti akan bekerja di daerah masing-masing di kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, NTT, Halmahera, Maluku dan Papua), untuk saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi juga diharapkan dapat mendalami keprihatinan-keprihatinan dalam konteks masing-masing daerah. Tidak berhenti pada upaya mendalami keprihatinan-keprihatinan itu, mahasiswa pun diantar untuk mencari solusi bagi pengembangan hubungan ekumenis dikawasan Indonesia Timur.

Suatu langkah baik sudah diambil oleh para mahasiswa/i sebagai calon-calon pemimpin gereja dan masyarakat pada masa depan, karena melalui forum ini, paling tidak akan terbina mentalitas calon pemimpin yang tidak gerejasentris atau wilayahsentris tetapi akan melihat dunia sebagai ladang misi bersama, dan secara khusus Indonesia Timur sebagai kawasan yang menjadi ladang pewujudan karya Allah. Dalam kaitan dengan maksud di atas maka penulis secara khusus menyoroti pengertian oikumene, upaya-upaya oikumene di

Indonesia dan peran GKI dalam pengembangan spiritualitas Ekumene di Indonesia Timur.

2. PENGERTIAN OIKUMENE

Kata *oikoumenè* berasal dari bahasa Yunani *Oikeô*, yang berarti tinggal, berdiam, mendiami. Istilah ini telah digunakan sejak Herodotos (abad ke-5 BCE.). Pada periode Helenis istilah ini digunakan dalam konteks sekuler (kekaisaran Yunani-Romawi) untuk menandai perbedaan kultural antara dunia yang beradab dan daerah-daerah barbar. Arti pertama dari istilah *oikoumenè* adalah: dunia yang didiami (aspek geografis, Lk. 4:5; Rm.10:18, Ibr. 1:6). Dari kata ini juga berarti seluruh umat manusia (Kis. 17:31, 19:27, Why. 12:9). Kemudian kata *Oikoumenè* mendapat arti politik: kekaisaran Romawi (Kis. 24:5) dan semua penduduknya (Kis, 17:6).

Dari bidang politik istilah oikumene dan oikumenis mulai dipakai oleh gereja. Oikumene dimengerti sebagai seluruh dunia yang didiami dan dikuasai oleh kekaisaran Romawi sebagai tempat gereja menjalankan misinya. Wilayah kerja gereja adalah oikumene. Dengan demikian gereja oikumenis mempunyai arti: gereja

universal, tetapi universal sebatas wilayah kekaisaran Romawi karena gereja saat itu tidak menyadari bahwa di luar batas-batas kekaisaran Romawi juga tinggal orang-orang yang dapat menjadi sasaran Injil.

Pada abad ke-4 C.E., oikumene mulai dimengerti sebagai “dunia Kristen”, dengan pengertian ganda (politik dan religius) yakni sebagai “kekaisaran Kristen” dan “keseluruhan gereja”. Sedangkan oikoumenikos (Latin: universalis atau generalis) menunjuk pada hal-hal yang memiliki keabsahan/kewibawaan secara universal seperti: konsili-konsili oikumenis atau sinode-sinode oikumenis. Pemahaman yang sama juga tampak dalam istilah “patriakh (at) oikumenis” untuk (ke) uskup (an) agung di Constantinopel atau dalam istilah “simbol oikumenis” yang muncul pada abad ke-16 untuk pengakuan iman rasuli, Nicaea - Constantinopel dan Athanasius.

Maksud gereja dengan sebutan itu ialah hendak mengatakan bahwa konsili-konsili atau sinode-sinode itu – yang diadakan atas perintah kaisar – tidak hanya dihadiri oleh uskup-uskup dari satu provinsi atau wilayah saja, tetapi dari seluruh kekaisaran Romawi. Jadi menurut Abineno, kata sifat oikumenis di sini berarti: mencakup seluruh dunia, yaitu seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, dan seluruh gereja.

Pada abad ke-18 terjadi perubahan pemahaman mengenai oikumene, khususnya dalam pengaruh Pietisme. Kirchberger mencatat bahwa di bawah pengaruh Pietisme gereja-gereja Protestan meninggalkan pembatasan diri pada negara atau wilayah kekuasaan tertentu dan mulai berpikir secara mondial, menyangkut seluruh dunia; dalam kaitan semangat misioner mereka. Hal yang sama ditegaskan pula oleh De Jonge, bahwa usaha kaum Pietis dan orang-orang Kristen kemudian yang sejiwa (umpamanya *Voluntary Movement*) juga dapat disebut oikumenis, sebab mengkonsentrasikan diri pada iman kepada Yesus Kristus

yang mempersatukan semua orang Kristen. Awal abad ke-20 gagasan oikumenis diberi arti geografis, yakni orientasi gereja misioner yang terarah kepada **seluruh dunia**, tetapi juga arti teologis bahwa sesungguhnya gereja merupakan **kesatuan fundamental** yang berakar di dalam Kristus. Inilah dasar bersama bagi kesatuan yang merupakan tugas yang masih harus dilakukan oleh gereja-gereja.

Dari pengalaman oikumenis gereja-gereja seperti diuraikan di atas maka sesungguhnya dewasa ini ada dua arti dan makna dalam kata oikumene: (1) universal, misioner, menyangkut seluruh dunia; (2) Sesuatu yang menyangkut kesatuan gereja-gereja. Kedua arti ini saling berhubungan karena gerakan oikumene modern berasal dari gerakan misi.

Dapat disimpulkan bahwa oikumene merupakan gerakan menyatukan gereja-gereja dalam derap langkah bersama secara universal, untuk melakukan misi gereja seperti diamanatkan oleh Yesus Kristus Kepala gereja (Mat. 28: 18-20).

3. SEKILAS UPAYA-UPAYA OIKUMENE DI INDONESIA.

Pada waktu dibentuk Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) tahun 1950 dirumuskan tujuan DGI yaitu: “membentuk gereja yang esa di Indonesia”. Setelah 34 tahun perjalanan sejarah DGI dalam upaya melaksanakan tujuannya itu, gereja-gereja di Indonesia merasa perlu untuk merumuskan kembali tujuan tersebut. Pada Sidang Raya X DGI 1984 di Ambon, dalam Tata Dasar PGI Pasal 4, mengenai Tujuan disebutkan sebagai berikut: “Tujuan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia adalah mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia”.

Tujuan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan yang oleh Sopater disebut sebagai “*creedal/confessional*”:

- a. Bahwa sesungguhnya orang-orang percaya di semua tempat dan segala abad dan dari segala zaman mengakui dan menghayati adanya gereja yang esa, kudus, am dan rasuli seperti keesaan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
- b. Bahwa pengakuan akan adanya satu gereja yang esa, kudus, am dan rasuli tadi adalah juga merupakan suatu panggilan dan suruhan bagi semua gereja untuk mewujudkannya agar dunia percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus menjadi Juru Selamat dunia.

Latar belakang ini memperlihatkan bahwa konsep GKYE tidak sekedar sebuah organisasi biasa, tetapi adalah bagian dari gereja yang esa, kudus, am dan rasuli seperti dikatakan dalam pengakuan iman Nicaea-Konstantinopel. Berarti GKYE adalah bagian dari gereja universal yang sudah ada, dalam pengertian diakui oleh segenap umat Kristen di dalam pengakuan iman atau credonya.

Gereja-gereja di Indonesia dalam lingkup PGI berusaha untuk mewujudkan tujuan pembentukan GKYE, tetapi dalam praktek ada dua faktor yang disebut Sopater sebagai penghalang keesaan, yaitu:

- a. Keterpisahan gereja-gereja yang belum terjembatani, oleh karena kepelbagaian denominasi (=pecahan,mazhab). Kata denominasi bahkan telah menjadi istilah baku dalam khasanah gereja untuk menunjuk pada identitas seseorang/kelompok (misalnya: Lutheran, Calvinis/Reformed, Methodis, Pentakosta, Baptis, KINGMI, dsb.). Di Indonesia gambaran kasar denominasi antara lain: Gereja Roma Katolik merupakan denominasi terbesar, dianggap sebagai suatu agama sendiri, disebut "agama Katolik". Gereja-gereja Protestan biasanya disebut sebagai "agama Kristen" yang mencakup gereja-gereja dari denominasi utama: Lutheran, Calvinis, Methodis, Mennonit, yang umumnya bergabung dalam PGI. Di samping PGI ada pula badan-badan lain seperti PII (Persekutuan Injili Indonesia) yang menaungi gereja-gereja dan yayasan-yayasan Injili, PBI (Persekutuan Baptis Indonesia) yang menghimpun gereja-gereja Baptis, begitu pun gereja-gereja Advent, Bala Keselamatan, dan gereja-gereja bebas lainnya terhimpun dalam persekutuan/badan tersendiri.
- b. Menanggapi faktor penghalang pertama yang dikemukakan Sopater, maka sebetulnya aspek "*creedal/confessional*" merupakan hal baik yang dapat menyatukan gereja-gereja. Bukan mencari perbedaan tetapi menjadikan pengakuan bersama sebagai titik temu dalam membina kehidupan bersama sebagai "tubuh Kristus". Dalam pengalaman sejarah di Indonesia, kendala bagi gereja-gereja untuk bersatu adalah ketika penyatuan gereja diarahkan kepada pewujudan organisasi yang birokratis. Sedangkan gereja dalam pengertian sebagai "persekutuan doa" atau "gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya", telah terwujud di tingkat bawah (jemaat/umat) dalam bentuk ibadah-ibadah bersama dan diakonia bersama.

Merasuk budaya kedaerahan dalam jati diri. Di kalangan Kristen Protestan lahir gereja-gereja daerah yang banyak kali berkaitan dengan suku dan mempunyai anggota yang amat besar dan turut mempengaruhi dinamika oikumene di Indonesia. Menyoroti hal ini, Abineno mengatakan:

Gereja-gereja kita di Indonesia tidak sama dengan gereja-gereja di luar negeri. Di situ gereja-gereja umumnya adalah gereja-gereja konfesional. Gereja-gereja kita di Indonesia tidak demikian. Sebagian besar dari gereja-

gereja kita di sini terutama gereja-gereja yang besar adalah gereja-gereja suku. Dalam kerjasama oikumenis soal "suku" sadar atau tidak sadar turut memainkan peranan. Pada waktu-waktu yang akhir ini soal ini bertambah urgen, karena banyak gereja suku telah memperluas daerah pelayanan mereka sampai ke daerah-daerah, yang dianggap oleh gereja suku lain sebagai daerah pelayanannya.

Sopater mempertanyakan apakah dalam pewujudan GKYE di Indonesia ada tempat bagi "jatidiri" gereja suku dengan semua penjabarannya? Menjawab pertanyaan Sopater, menurut Singgih jika warna suku (etnisisme) dimutlakkan maka bukan hanya keesaan gereja yang terhambat, melainkan hakikat gereja yang universal juga dilemahkan; tetapi pertanyaan berikut adalah: apakah gereja etnis itu merupakan suatu kontradiksi?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu relevan dengan keberadaan gereja-gereja kita di Indonesia Timur yang sebagian besar dari latar belakang gereja suku, dan kemudian karena terjadi mobilisasi masyarakat suku ke daerah lain (suku lain) maka keberadaan gereja-gereja ini ada dalam dualisme: bergabung dengan gereja seazas di daerah baru atau mendirikan gereja suku berdasarkan kesamaan etnis di daerah baru. Hal ini sangatlah terkait dengan eklesiologi dari komunitas yang bersangkutan.

Mengenai hal ini Konsultasi Teologi yang diadakan di Sukabumi, 15-19 Januari 1982 memberi arah sebagai berikut:

*"Diharapkan Gereja-gereja makin menyadari bahwa masing-masing mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri yang turut diwarnai oleh lingkungan budaya, suku dan wilayah setempat, tetapi kemudian ditantang untuk melihat kehadirannya dalam arti yang baru. Yakni tidak lagi sendiri-sendiri, melainkan suatu **kehadiran bersama**. Apakah artinya sekarang kehadiran bersama Gereja-gereja yang ditempatkan dan dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan manusia? Bagaimana upaya untuk memikirkan ulang, memperluas, memperdalam dan menjernihkan **eklesiologi** yang dimiliki oleh Gereja-gereja kita? Bukankah perluasan cakrawala eklesiologis itulah yang membuka kemungkinan untuk menghidupi dan menjalani **sejarah bersama** Gereja-gereja di tengah pembangunan? Ini berarti Gereja-gereja di dorong untuk mempersiapkan dan melengkapi diri bagi upaya mengembangkan teologi yang menjawab kebutuhan warga gereja dalam konteks lingkungan setempat, sewilayah, nasional maupun internasional".*

Dengan demikian menghadapi konteks yang selalu berubah maka gereja-gereja di Indonesia perlu kritis dan realistik untuk menjawab

kebutuhan konteks yang di dalamnya gereja berada.

4. PERAN GKI DAN PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS OIKUMENE DI INDONESIA TIMUR.

Sejak berdiri sendiri pada 26 Oktober 1956, GKI di Tanah Papua menyatakan dirinya sebagai: "Persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di Nederlands-Nieuw-Guinea". Artinya GKI pada dasarnya adalah himpunan dari jemaat-jemaat yang dalam sejarah pekabaran Injil di Tanah Papua, tumbuh di berbagai tempat dan kemudian sepakat untuk bersama-sama bertumbuh, bersaksi dan melayani sebagai sekutu-sekutu di dalam Tuhan.

Wilayah pelayanan GKI, sesuai Tata Gereja GKI, adalah di Papua dan Pimpinan GKI berkedudukan di Jayapura. Berdasarkan pernyataan ini maka "GKI di Tanah Papua tidak akan membentuk jemaat-jemaat di luar daerah Papua, melainkan akan melayani dan bersaksi di daerah Papua sebagai wilayah pelayanannya (Bnd. 2 Kor. 10: 13).

Secara sosio-antropologis persekutuan jemaat-jemaat itu tidak lain merupakan persekutuan dari suku-suku yang ada di Papua dengan kepelbagaian budaya dan konteks. Setelah Papua bergabung dengan Indonesia maka suku-suku lain dari luar Indonesia yang datang dan berkerja di Papua bergabung sebagai anggota dari GKI di Tanah Papua. Kenyataan ini menunjukkan bahwa GKI merupakan persekutuan yang multi etnis serta multi kultur, dan merupakan suatu bentuk "oikumene secara besar-besaran". Artinya terjadi persekutuan di antara suku-suku yang ada di Papua, tetapi juga persekutuan dengan suku-suku/bangsa lain dari luar Papua.

Bukan itu saja dari sejarah pekabaran Injil yang dilakukan oleh badan-badan Zending yang bekerja di Papua (a.l: Gossner/Heldring, UZV, DZV, RMG/VEM), ada keragaman ajaran dan tradisi yang diwariskan kepada GKI. Lagi pula masuknya anggota gereja dari gereja-gereja lain di Indonesia juga turut memperkaya khazanah/dinamika bergereja GKI di TP.

Melihat penegasan GKI mengenai "kedudukan organisasi GKI" maka GKI pada hakikatnya membatasi pelayanan hanya di Tanah Papua; tidak mengintervensi ke daerah lain di Indonesia untuk mendirikan GKI di daerah di mana sudah ada gereja-gereja seazas. Warga GKI yang belajar atau bekerja di daerah lain dianjurkan untuk menjadi warga gereja seazas di tempat di mana mereka berada. Sikap GKI ini telah mendahului kesepakatan Gereja-gereja di Indonesia yang dituangkan dalam Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM) yang dihasilkan pada SR X PG di

Ambon tahun 1984, dan sampai saat ini tetap konsisten dengan sikap ini.

Ini merupakan suatu model oikumene di Indonesia karena dengan menempatkan kata di di belakang kata GKI maka GKI hendak menegaskan keberadaannya di wilayah Papua. Secara teologis itu berarti GKI bukan gereja dari suku-suku Papua (atau salah satu suku di Papua), tetapi adalah Gereja Tuhan yang bertempat di Tanah Papua. Ketika Papua terbagi menjadi dua Provinsi pun, GKI tetap bertekad untuk menjadi Gereja yang satu yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, karena Tanah Papua adalah wilayah pelayanannya.

Dengan eklesiologi GKI yang demikian, maka dapat saya katakan bahwa sejak GKI berdiri sendiri, menghadapi realitas keragaman suku-suku di Papua (terdapat kurang lebih 253 bahasa), maka GKI telah menjadi "Gereja kesatuan" yang menyatukan suku-suku yang sebelumnya hidup terpisah-pisah oleh kondisi geografi dan tidak saling mengenal (bahkan bermusuhan). Ini terjadi karena sejak awal badan-badan zending yang bekerja di Papua (Gossner/Heldring, UZV, DZV, kemudian RMG/VEM) bersama-sama bekerja untuk tujuan yang sama kendati pada wilayah yang berbeda.

Dengan spesifikasi GKI seperti ini tidak berarti GKI menjadi gereja yang terkungkung dalam wilayah Papua saja, sebab setelah berdiri sendiri, GKI menjadi anggota WCC, CCA, PGI (selah menjadi bagian dari Indonesia), dan bekerja sama dengan ACRA, PCC (Dewan Gereja-gereja di Pasifik), Uniting Church di Australia, PKN Belanda, UEM, Gereja di Korea Selatan, MCC di Amerika, dan gereja-gereja di Afrika. Kerjasama ini dilakukan baik melalui kerjasama dalam program-program pertukaran tenaga maupun kegiatan gerejawi lainnya.

Di lingkup nasional, GKI menerima tenaga-tenaga/tamatan dari gereja lain untuk bekerja dan menjadi tenaga pelayan di GKI (al. HKBP, GBKP, GMIM, GPM, dll.). Hal ini sesuai dengan PSMSM yang disepakati bersama anggota-anggota PGI dalam SR PGI X di Ambon 1984. Oikumen juga terjalin di aras komunitas basis (jemaat) dengan adanya kunjungan timbal balik antara jemaat-jemaat GKI (Samanhudi, Jakarta), GMIM, GPM, GTR, dll. Dengan saling mengenal antar pribadi/jemaat maka ada pemahaman bersama mengenai kekayaan rohani masing-masing yang memperdalam rasa kesatuan sebagai "tubuh Kristus". Ini tentu akan berdampak pada aksi diakonia dan marturia bersama sebagai umat Kritis di Indonesia.

Bertolak dari identitas GKI, dan hubungan oikumenisnya dengan gereja-gereja di dalam dan di luar negeri, diharapkan ada dampak dan makna khusus bagi gerakan oikumene di

Indonesia dan secara khusus di Indonesia Timur.

5. KESIMPULAN

Jika ada anggapan bahwa Papua sebagai daerah tertinggal di ujung Timut Indonesia, maka dibidang oikumene, saat ini GKI telah menjadi bintang kejora di ufuk timur yang memberi contoh konkrit kehidupan oikumene. Contoh bagi kehidupan oikumene di Indonesia yang tampak jelas dalam eklesiologinya dan dalam kehidupan berjemaat di Papua. Selamat beroikumene.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abineno, J. L. Ch., 1984, *Oikumene dan Gerakan Oikumene*, Jakarta: BPK-GM,

-----, 1997. "*Dari Dewan Gereja-gereja di Indonesia ke Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*" dalam J.M. Pattiasina dan Weinata Sairin (Peny.), *Gerakan Oikumene: Tegar Mekar di Bumi Pancasila*, Jakarta: BPK-GM,

De Jonge, Christian, 1993, *Menuju Keesaan Gereja: Sejarah, Dokumentasi dan Tema-tema Gerakan Oikumene*, Jakarta: BPK-GM,.

Kirchberger, Georg, 2010, *Gerakan Ekumene: Suatu Panduan*, Maumere: Ledalero,.

PGI, 1996. *Lima Dokumen Keesaan Gereja – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta.

Lossky, Nicholas et al., (ed.), 1991, *Dictionary of Ecumenical Movement*, Geneva: WCC Publications & Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company,.

DGI, 1982, *Memasuki Sejarah Bersama: Membarui, Membangun dan Mempersatukan Gereja*, Laporan Konsultasi Teologi, Sukabumi 15-19 1982, Jakarta

Singih, E.G., 2000 "*Sudah Maksimal atau Belum? Tanggapan terhadap Makalah Bapak Pdt. Soelarso Sopater, dalam Setia, Jurnal Teologi Persetia No.1/2000.*

Sopater, Sularso, 2000, "*PGI dan Gereja Kristen Yang Esa*" dalam *Setia, Jurnal Teologi Persetia No.1/2000.*

Sinode GKI, 1956, *Tata Gereja Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea, Hollandia*: Kantor Sinode Umum Gereja Kristen Injili.

Tata Gereja, 1998, *Peraturan Pokok, Peraturan Khusus dan Peraturan Pelaksanaan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, Jayapura*: BP Am Sinode GKI di Irian Jaya.

WCC, 2013, *Handbook WCC 10th Assembly Busan*.